

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin Fakhry, dkk, 2023, *Ilmu Perundang-Undangan*, Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Black Henry Campbell, 1979 *Black's Law Dictionary, Fifth Edition*, USA: West Publishing Co., St. Paul Minn,
- Danusaputro Munadjat, 1985, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Bandung: Binacipta.
- Erwin Muhamad, 2009, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon Philipus Mandiri, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika.
- HS Salim, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS Salim, 2018, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*. Depok: Sinar Grafika.
- HR Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Badan Geologi, 2002, *Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Indonesia Tahun 2022*,
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Poerwadarminta WJS, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Rajawali Pers
- Selamat Marsel, 2018, *Hukum Sumber Daya Alam Indonesia*, Malang: Setara Pers
- Syahrizal Darda, 2013, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Medpress Digital
- Salinding Marthen, 2022, *Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Usaha Pertambangan Sumber Daya Alam*, Indramayu: Penerbit Adab.

Sirajuddin, Dkk, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*, Malang: Setara Press.

Sururama Rahmawati dan Amalia Rizki, 2020, *Pengawasan Pemerintah*, Bandung: Cendikia Press.

Sugiarto Umar Said, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Siahaan N.H.T., 2009, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam

Jurnal:

Barkatullah Abdul Rahim, 2016, *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan di Wilayah Penambangan Intan Tradisional Cempaka*. Volume. VIII. Al'Adi

<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/673/589>

Fahmi Sudi, 2011. *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup*. Volume 18. Jurnal Hukum.

<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/4017/3577>

Hariyanto. 2020. *Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Volume. 3. Volksgeits

<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/4184/2341>

Lawani Adelia Fernanda, dkk, 2021, *Hubungan Eksekutif dan Legislatif Dalam Pembuatan Peraturan Perundang Undangann di Indoensia*, volume IX, Lex Administratum,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33177/31374>

Kristanti Rina, dkk, 2019. *Institutional Performance of Mining Reclamation in Forest Areas of East Kalimantan*. Volume 25 (2) Jurnal Manajemen Hutan Tropika

<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmht/article/view/25504/17403>

Rahim Abdur dkk, 2023, *Analisis Yuridis Perkembangan Kewenangan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, volume 6, no. 4, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan.

<https://jiip.stkipyapisdmpu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/1839/1563>

S. Machmud (2019). *Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif*. Volume 7, no. 2. JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA.

<https://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/660>

Zhenqi Hu. 2018. *Special Issue on Land Reclamation in Ecological Fragile Areas. International Journal of Coal Science & Technology*, Int J Coal Sci Technol 5, 1-2.

<https://link.springer.com/article/10.1007/s40789-018-0206-5>

Skripsi/Tesis/Disertasi:

Nurmardiansyah Eko, 2014, *Pengembangan Kesadaran Terhadap Keadilan Lingkungan (Environmental Justice) Melalui Penataan Sistem Hukum Berdasarkan Pendekatan Sistem (Systems Approach)*, Disertasi: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (tidak diterbitkan),

Website/internet:

Valerie Agustine Budianto, *3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya*, 26 April 2022, Internet, 23 Maret 2024, WWW: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/>

Dani Suluh. *Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan*. 29 Februari. WWW: <https://danisuluhpermadi.web.id/umum/asas-desentralisasi-dekonsentrasi-dan-tugas-pembantuan/>

Internet, 19 April 2024, WWW: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batubara-masih-3884-miliar-ton-teknologi-bersih-pengelolaannya-terus-didorong>

Internet, 19 April 2024, WWW: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>

Internet, 19 April 2024, WWW: <https://agincourtresources.com/id/2019/07/29/manfaat-industri-pertambangan-dan-perannya/>

Internet, 19 April 2024, WWW: <https://www.asheforklift.com/post/pertambangan-adalah>

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->

Putusan Mahkamah Konsistusi Republik Indonesia, nomor 002/PUU-1/2003

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=002%2FPUU-I%2F2003>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38578/uu-no-4-tahun-2009>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022>

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/177410/pp-no-96-tahun-2021>

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/64701>

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021>

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/206052/perpres-no-55-tahun-2022>

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/22213>

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/197490/perda-prov-jawa-tengah-no-10-tahun-2011>

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Jawa Tengah
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/206508/pegub-prov-jawa-tengah-no-27-tahun-2018>

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa
Tengah
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/206509/pegub-prov-jawa-tengah-no-28-tahun-2018>

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/206529/pegub-prov-jawa-tengah-no-42-tahun-2018>